

BAB V

KESIMPULAN

V.1 Kesimpulan

Mengacu hasil estimasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat dirumuskan beberapa simpulan terkait pengaruh variabel UMK, RLS, dan LJP terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten dan Jawa Tengah, sebagai berikut:

1. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) menunjukkan hubungan negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, peningkatan UMK secara umum berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan, yang menunjukkan bahwa pendapatan minimum yang lebih besar berpotensi memperkuat daya beli sekaligus memperbaiki kesejahteraan warga di kelas ekonomi bawah.
2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Semakin lama penduduk mengenyam pendidikan, maka kecenderungan untuk keluar dari jerat kemiskinan pun semakin besar. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan berperan strategis dalam rangka memperkuat kapasitas SDM dan membuka jalan menuju kesempatan kerja yang lebih menjanjikan.
3. Variabel Jumlah Penduduk (LJP) memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kemiskinan. Artinya, peningkatan jumlah penduduk cenderung diikuti oleh meningkatnya angka kemiskinan, terutama apabila tidak disertai dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai serta pemerataan distribusi pendapatan.
4. Hasil uji interaksi menunjukkan bahwa pengaruh UMK dan RLS terhadap kemiskinan berbeda antara Provinsi Banten dan Jawa Tengah. Dampak negatif UMK dan RLS terhadap kemiskinan lebih kuat di wilayah Jawa Tengah dibandingkan di Banten, mengindikasikan perbedaan efektivitas kebijakan antar wilayah.
5. Ketiga variabel independen, yaitu UMK, RLS, dan LJP secara bersama-sama memiliki dampak yang nyata terhadap kemiskinan, yang

mengindikasikan bahwa penurunan tingkat kemiskinan memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan sinergis dari berbagai aspek.

V.2 Saran

V.2.2 Saran Praktis

1. Pemerintah daerah di Banten dan Jawa Tengah perlu memaksimalkan kebijakan UMK dengan mempertimbangkan aspek makroekonomi serta kebutuhan esensial kelompok berpenghasilan rendah, disertai pengawasan terhadap kepatuhan dunia usaha dalam pelaksanaannya.
2. Penguatan investasi di bidang pendidikan perlu diprioritaskan, khususnya pada jenjang menengah dan pendidikan vokasional, guna memperkuat kapasitas keterampilan serta meningkatkan kompetitivitas tenaga kerja di daerah.
3. Pemerintah di tingkat pusat dan daerah harus memperkuat kebijakan pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk dengan penerapan program KB yang merata dan inklusif, sekaligus memperluas ketersediaan lapangan kerja serta pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
4. Dibutuhkan integrasi antara kebijakan upah, pendidikan, dan ketenagakerjaan agar strategi pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

V.2.1 Saran Teoritis

1. Studi ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan terkait kemiskinan di tingkat regional dengan memperluas jumlah provinsi atau wilayah yang diamati. Studi berikutnya dianjurkan untuk mengeksplorasi variabel lain yang berpeluang memengaruhi kemiskinan, seperti pengangguran, pertumbuhan ekonomi, atau IPM.
2. Penggunaan model analisis yang berbeda seperti Dynamic Panel Data (GMM) atau pendekatan kuantitatif lainnya dapat memberikan perspektif baru dan memperkuat hasil penelitian, khususnya untuk mengatasi potensi bias endogenitas.